

# Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

*Financial  
Performance of  
Public Institution*

Carlos Arnold Atmoko dan Khairudin

Program Studi Akuntansi, Universitas Bandar Lampung Bandar Lampung, Indonesia

E-Mail : carlos.18021003@student.ubl.ac.id

**291**

## ABSTRACT

*The monetary implementation of local governments can be seen from the financial performance of their government which is a reflection of the level of achievement of performance results which include planned expenditures and regional revenues as measured by indicators that have been directed through a policy or law regulation within a period of financial planning, which can be used as a reference for the government to regulate its regional finances. This study aims to examine the impact of regional income and capital expenditure on financial performance, especially for local governments in Lampung Province in 2017-2019. Information or data that is sampled in this study utilizes secondary data ranging from financial statistics reports to local governments in the Lampung region. The research methods used are: (1) Descriptive Statistics, (2) Classical Assumption Test, (3) Panel data regression model, (4) Model feasibility test (F), (5) Hypothesis Test (T), (6) Coefficient Determination (R<sup>2</sup>). The results of this study conclude that local revenue has a positive and significant influence on the financial performance of local governments, while capital expenditures have no impact or effect on the financial performance of local governments. This implies that if the original regional income obtained is high, the presentation of the regional government's financial performance will also increase.*

**Keywords:** local revenue; capital expenditure; financial performance

## ABSTRAK

Pelaksanaan moneter pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintahannya yang merupakan cerminan dari tingkat pencapaian hasil kinerja yang mencakup rencana pengeluaran dan pendapatan daerah yang diukur oleh indikator yang telah diarahkan melalui suatu kebijakan atau peraturan undang-undang dalam waktu satu periode rencana keuangan, yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah guna mengatur finansial daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan khususnya pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung tahun 2017-2019. Informasi atau data yang dijadikan sampel pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder mulai dari laporan statistik keuangan pemerintah daerah di wilayah Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu: (1) Statistik Deskriptif, (2) Uji Asumsi Klasik, (3) Model regresi data panel, (4) Uji kelayakan model (F), (5) Uji Hipotesis (T), (6) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>). Hasil penelitian ini mengangkat kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara itu belanja modal tidak berdampak atau berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini menyiratkan bahwasannya apabila pendapatan asli daerah yang diperoleh tinggi, semakin meningkat pula presentasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah; belanja modal; kinerja keuangan

## PENDAHULUAN

Kondisi pemerintahan di Indonesia cenderung berubah seiring peristiwa reformasi berhembus di Indonesia. Dalam situasi dimana Indonesia saat itu masih dilanda krisis ekonomi yang mencekik tingkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengambil

Submitted:  
FEBRUARI 2022

Accepted:  
JULI 2022

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 10 No. 2, 2022  
pg. 291-296  
IBI Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852  
E-ISSN 2721 – 3048  
DOI: 10.37641/jiakes.v10i1.1295

keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah mulai merubah struktur pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi wewenang lebih luas dalam mengatur pemerintahan daerahnya. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah bisa ditakar dari segi kapabilitas pemda mengeksplorasi kapasitas daerah yang tersedia, yang pada akhirnya dapat berkontribusi kepada kenaikan pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Tujuan diukurnya kinerja keuangan adalah agar dapat menilai kinerja keuangan dengan melihat potensi dan efektivitasnya dengan memperhatikan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan berupa laporan operasi pemerintah (Bastian, 2010). Manfaat kinerja keuangan salah satunya sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam periode berikutnya lebih lanjut sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dengan perbandingan skema tenaga kerja (Zuhri & Soleh, 2016). Provinsi Lampung sendiri dari total limabelas kota dan kabupaten di Provinsi Lampung pada periode 2017-2019 menunjukkan hasil kinerja keuangan yang kurang baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 menyatakan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Lampung masih berstatus menuju mandiri, dimana Provinsi Lampung mendapatkan nilai 0,4049 dari hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terhadap 33 provinsi di Indonesia. Kemandirian fiskal atau biasa disebut kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232). Berdasarkan data yang diambil dari BPS wilayah Lampung, realisasi penerimaan dan pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum menunjukkan hasil yang optimal pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 hingga 2019. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah cenderung turun sebesar 6,32% untuk penerimaan dan 7,47% untuk pengeluaran pada tahun 2018, begitu pun pada tahun 2019 realisasi penerimaan dan pengeluaran juga tercatat turun sebesar 4,19% untuk penerimaan dan 8,49% untuk pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Prov Lampung pada periode 2017 hingga 2019 masih menunjukkan kinerja keuangan yang cukup rendah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal.

Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan diantara pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik dan pengelola, sejak perusahaan publik melakukan pemisahan antara keduanya, terdapat asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Rakyat (sebagai prinsipal) akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam pelaksanaan kontrol tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik (Badrudin, 2015)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 PAD adalah pendapatan yang di dapat oleh daerah yang didapat berdasarkan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menerangkan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari seluruh pendapatan lokal yang dihasilkan melalui berbagai sumber ekonomi lokal.

Belanja modal merupakan belanja yang menciptakan suatu aset tetap dan pada umumnya dilaksanakan oleh otoritas publik. Peralatan, bangunan, infrastruktur, dan sumber daya tetap lainnya adalah contoh dari sumber daya tetap pemerintah daerah yang diperoleh dari belanja modal (Nordiawan & Hertianti, 2006). Belanja modal diarahkan untuk memperoleh peralatan, bangunan, infrastruktur dan sumber daya tetap lainnya

yang termasuk dalam aset tetap dari pemerintah daerah. Secara umum porsi belanja modal dengan penggunaan provinsi berkisar antara 5% - 20% (Mahmudi, 2010).

Kinerja adalah klarifikasi atas perwujudan tujuan, sasaran, misi, dan visi sebuah organisasi atas penerapan suatu program atau strategi. Rasio keuangan atas komponen uraian pertanggungjawaban kepala daerah berbentuk perhitungan APBD adalah salah satu penilaian kinerja tersebut (Bastian, 2010). Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) pemeriksaan kinerja keuangan dapat dimanfaatkan dalam menilai peranan legislatif daerah dalam menjalankan anggaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Menurut Sugiyono (2013) gagasan mengenai kausalitas merupakan pemeriksaan keadaan dan hasil logis hubungan antara faktor-faktor bebas, khususnya hubungan yang terjadi antar variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Sampel yang diambil berupa data kuantitatif dan sumber informasi yang ditetapkan berasal dari data sekunder, Kategori data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel sebagai perpaduan informasi *cross-section* dari 15 kab/kota di Prov Lampung dengan *time series* dari tahun 2017-2019, sehingga agregat 45 sampel informasi digunakan sebagai model dalam tinjauan ini. Adapun definisi dan pengukuran variabel tampak sebagai berikut:

**Tabel 1. Definisi Variabel**

Variabel	Pengukuran Variabel
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan asli daerah diukur oleh rasio PAD dengan total pendapatan daerah x 100% (Marizka, 2013)
Belanja Modal (X2)	Belanja Modal diukur oleh rasio terhadap belanja daerah x 100% (Sinaga, 2016)
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD). (Halim dalam Adhiantoko, 2013)

Pengujian menggunakan persamaan model data panel sebagai berikut:

$$KK_{it} = \alpha + \beta_{1}PAD_{it} + \beta_{2}BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana KK adalah Kinerja Keuangan selama periode pengamatan, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah selama periode pengamatan dan BM adalah Belanja Modal selama periode pengamatan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

	REKD	PAD	BM
Mean	1.008000	0.081778	0.212444
Median	0.990000	0.060000	0.220000
Maximum	1.500000	0.290000	0.440000
Minimum	0.780000	0.030000	0.070000
Std.Dev.	0.103827	0.062533	0.072962

Sumber : data diolah, 2022

Nilai PAD paling tinggi yaitu di Kota Bandar Lampung di tahun 2017 sebesar 29%, sementara itu nilai PAD terendah terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 sebesar 3%. Rata-rata PAD selama tahun 2017-2019 sebesar 8,1%. Masih rendahnya nilai PAD disebabkan masih belum optimalnya penerimaan PAD yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga masih bergantung terhadap dana dari pusat.

Variabel yang kedua yaitu belanja modal. Dapat dilihat nilai paling tinggi / maximum dari belanja modal adalah sebesar 44% yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017 dan nilai terendah/ minimum sebesar 7% yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018. Rata-rata belanja modal selama tahun 2017-2019 sebesar 21,2%. Masih rendahnya nilai belanja modal menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih kurang dalam pengalokasian anggaran yang ada untuk membangun infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Nilai mean REKD pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama 3 tahun periode 2017-2019 adalah 100,8% dimana hasil tersebut nilainya melebihi standar efisiensi yang ada menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan masih tidak efisien. Sedangkan nilai tertinggi/ maximum dari REKD adalah sebesar 150% yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 dan nilai paling rendah / minimum sebesar 78% yang terdapat di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis X1 dan X2 Terhadap Y dengan  $\alpha=5\%$**

Hipotesis	Koefisien	$\alpha=5\%$	P_value	Kesimpulan
H1 Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah	3.424661	0,05	0.0009	Hipotesis Diterima
H2 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	-0.071207	0,05	0.8173	Hipotesis Ditolak

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa hipotesis penelitian (H1) dapat terdukung dan diterima. Penerimaan hipotesis penelitian ini lantaran nilai dari PAD memiliki nilai sebesar 0.0009. Hasil tersebut memberi tanda bahwa  $PAD < \alpha=0,05$  sehingga hipotesis "terdukung", dikarenakan pendapatan yang diterima suatu daerah bisa menentukan baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah. Temuan ini memperkuat hasil riset yang telah dilakukan Antari & Sedana (2018) menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Namun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Andirfa (2018) dimana secara parsial variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Dapat dilihat juga bahwa hipotesis penelitian (H2) tidak dapat didukung dan ditolak. Penolakan hipotesis penelitian ini dikarenakan nilai dari BM sebesar 0.8173, dimana nilai  $BM > \alpha=0,05$  yang menandakan variabel independen BM tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel REKD. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Malau, E. I. (2019), Djuniar, L., Zuraida, I. (2018) yang menemukan variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Asnidar (2019) yang menemukan belanja modal memberikan dampak positif pada kinerja keuangan di Kota Langsa apabila belanja modal meningkat 1% maka kinerja keuangan Kota Langsa juga naik sebanyak 9,79%.

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan riset ini berhasil mendapatkan value PAD dan belanja modal masih relatif cukup rendah. Selain itu, riset ini berhasil menemukan bahwa pendapatan asli daerah berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu belanja modal tidak berdampak

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan penerimaan PAD dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diimbangi peningkatan kualitas SDM, tenaga pemungut pajak, serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pengelolaan PAD di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Udayana University).
- Asnidar, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 9-18
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi ke-3*. Erlangga.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 445-455.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan di Bei. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Herjanti, S. and Teg, I.W.T., 2020. Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), pp.37-48.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN.
- Malau, E. I. (2019). *The Effect of Local Government Revenue (Lgr), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress on The Financial Performance of Regional Government in the District/City of Sumatera Utara Province. International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 2(2), 1-15.
- Marizka, Reaza. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011).
- Muliani, L. E., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, K. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responcibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)*. 2, 10.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pertiwi, A.R., Sutarti, S. and Hasibuan, D.H., 2019. Pengaruh Penerapan Penurunan Nilai Aset Tetap Menurut Psak 48 Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(1), pp.224-231.
- Sinaga, A. N. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2013* (Doctoral Dissertation, Unimed)
- Sudradjat, S., Ahmar, N. and Mulyadi, J.M.V., 2017. Pengaruh Leverage, Arus kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Fixed Asset Intensity terhadap Keputusan Revaluasi Aset tetap (Studi Empiris pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2012 sd 2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), pp.129-142.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 280 ayat (1) huruf a tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Pasal 3 huruf (a) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>